

BAB II

GAMBARAN UMUM KOTA SEMARANG

2.1 Sejarah Kota Semarang

Kota Semarang memiliki akar sejarah yang panjang, bermula sekitar abad ke-8 dari sebuah kawasan pesisir bernama Pragota (Bergota) yang berada di bawah kekuasaan Kerajaan Mataram Kuno. Kawasan tersebut berfungsi sebagai pelabuhan, dan di sekitarnya terdapat sejumlah pulau kecil yang lama-kelamaan menyatu membentuk daratan yang kini dikenal sebagai Kota Semarang bagian bawah.

Dikisahkan bahwa seorang tokoh dari Kesultanan Demak bernama Made Pandan, yang merupakan seorang ulama asal Arab bernama asli Maulana Ibnu Abdul Salam, mendapat perintah dari Sunan Kalijaga untuk menggantikan kedudukan Syekh Siti Jenar yang ajarannya dianggap menyimpang. Bersama putranya, Made Pandan meninggalkan Demak dan menetap di sebuah tempat yang kemudian disebut Pulau Tirangan. Di sana ia membuka hutan dan menyebarkan agama Islam. Seiring berjalannya waktu, kawasan itu semakin subur, dan dari celah-celah kesuburannya tumbuh pohon asam yang jarang dalam bahasa Jawa disebut asem arang, sehingga tempat itu diberi nama Semarang.

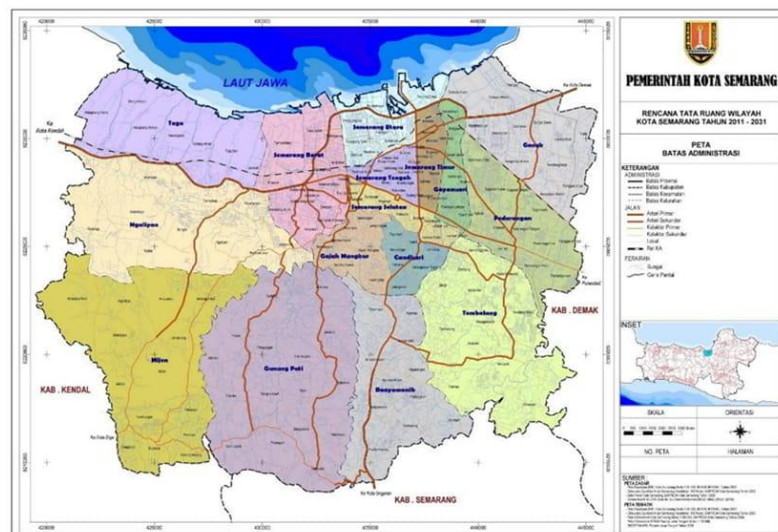
Made Pandan, yang kemudian bergelar Ki Ageng Pandan Arang, membangun sebuah masjid yang menjadi cikal bakal Masjid Agung Semarang. Pengaruhnya yang terus berkembang menarik perhatian Sultan Hadiwijaya dari Pajang, sehingga Semarang ditingkatkan statusnya menjadi setingkat kabupaten. Melalui konsultasi dengan Sunan Kalijaga, Pandan Arang dinobatkan sebagai Bupati Semarang yang pertama. Peristiwa itu bertepatan dengan peringatan Maulid

Nabi Muhammad SAW pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 854 H, atau tepatnya 12 Mei 1547 M, yang hingga kini diperingati sebagai hari jadi Kota Semarang.

2.2 Karakteristik Wilayah

2.2.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kota Semarang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah yang terletak di pesisir utara Pulau Jawa. Sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia, Semarang dikenal sebagai pusat perdagangan, industri, dan pariwisata di wilayah Jawa Tengah. Kota ini memiliki luas wilayah 373,70 km² atau sekitar 1,15% dari total luas daratan Provinsi Jawa Tengah. Secara administratif, Kota Semarang berbatasan dengan Kabupaten Kendal di sebelah barat, Kabupaten Demak di sebelah timur, Kabupaten Semarang di sebelah selatan, dan Laut Jawa di sebelah utara. Kota ini terbagi menjadi 16 kecamatan dan 177 kelurahan. Kecamatan terluas adalah Gunungpati (58,27 km²), diikuti oleh Mijen (56,52 km²), sedangkan kecamatan terkecil adalah Semarang Tengah (5,17 km²).



Gambar 13. Luas dan Batas Wilayah Administrasi Kota Semarang
Sumber: Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID), 2024

Tabel 15. Kepadatan Penduduk Kota Semarang

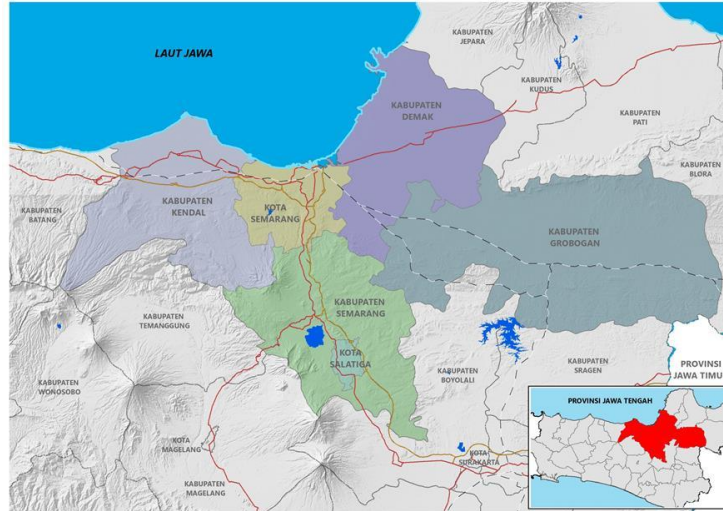
No	Kecamatan	Kelurahan	Luas Wilayah Km²
1	Mijen	14	56,52
2	Gunungpati	16	58,27
3	Banyumanik	11	29,74
4	Gajahmungkur	8	9,34
5	Semarang Selatan	10	5,95
6	Candisari	7	6,40
7	Tembalang	12	39,47
8	Pedurungan	12	21,11
9	Genuk	13	25,98
10	Gayamsari	7	6,22
11	Semarang Timur	10	5,42
12	Semarang Utara	9	11,39
13	Semarang Tengah	15	5,17
14	Semarang Barat	16	21,68
15	Tugu	7	28,13
16	Ngaliyan	10	42,99
	Kota Semarang	177	373,78

Sumber: Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID), 2024

2.2.2 Letak dan Kondisi Geografis

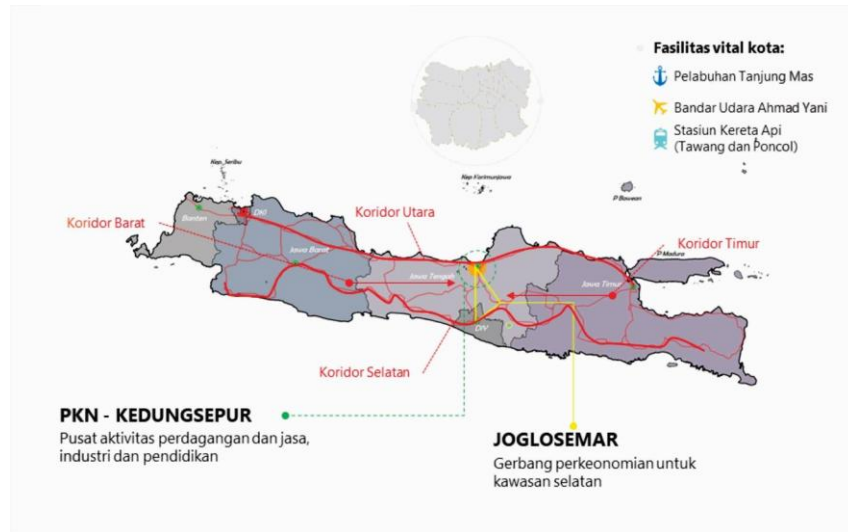
Kota Semarang terletak di posisi strategis di tengah Pulau Jawa, antara garis 6°50' – 7°10' Lintang Selatan dan 109°35' – 110°50' Bujur Timur. Sebagai ibu kota provinsi sekaligus simpul jalur lalu lintas ekonomi, Semarang tidak hanya

berperan sebagai pusat pemerintahan tetapi juga sebagai salah satu pusat ekonomi Jawa Tengah.



Gambar 14. Letak dan Kondisi Geografis Provinsi Jawa Tengah
Sumber: Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID), 2024

Posisi strategis ini didukung oleh berbagai fasilitas transportasi penting, antara lain Pelabuhan Tanjung Emas, Bandar Udara Internasional Ahmad Yani, Terminal Terboyo, serta Stasiun Kereta Api Tawang dan Poncol. Semarang juga merupakan bagian dari kawasan strategis nasional Kedungsepur yang mencakup Kabupaten Kendal, Demak, Semarang, Kota Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Grobogan, serta bagian dari segitiga pusat pertumbuhan regional Joglosemar bersama Yogyakarta dan Solo. Keberadaan jalan tol Trans Jawa yang melintasi kota ini semakin memperkuat peran Semarang sebagai kota transit dan mendorong peningkatan mobilitas orang maupun barang.

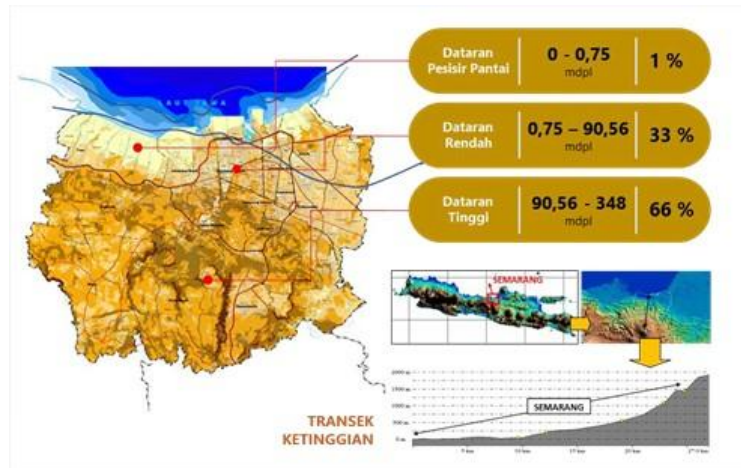


Gambar 15. Letak dan Kondisi Geografis Kota Semarang Secara Kewilayahan

Sumber: Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID), 2024

2.2.3 Topografi

Kondisi topografi Kota Semarang sangat bervariasi, dengan ketinggian wilayah antara 0,75 meter hingga sekitar 348 meter di atas permukaan laut. Secara morfologis, Semarang memiliki karakter unik yang terdiri dari dataran pesisir, dataran rendah, dan perbukitan. Bagian utara kota yang meliputi Kecamatan Tugu, Semarang Barat, Semarang Utara, dan Genuk didominasi oleh dataran rendah dan kawasan pesisir, dikenal sebagai Semarang Bawah. Di sinilah pusat pemerintahan, perdagangan, stasiun, dan bandara berada. Sementara bagian selatan yang berbukit dikenal sebagai Semarang Atas, mencakup Kecamatan Mijen, Gunungpati, Banyumanik, dan Tembalang dengan ketinggian antara 90,56 hingga 348 mdpl.

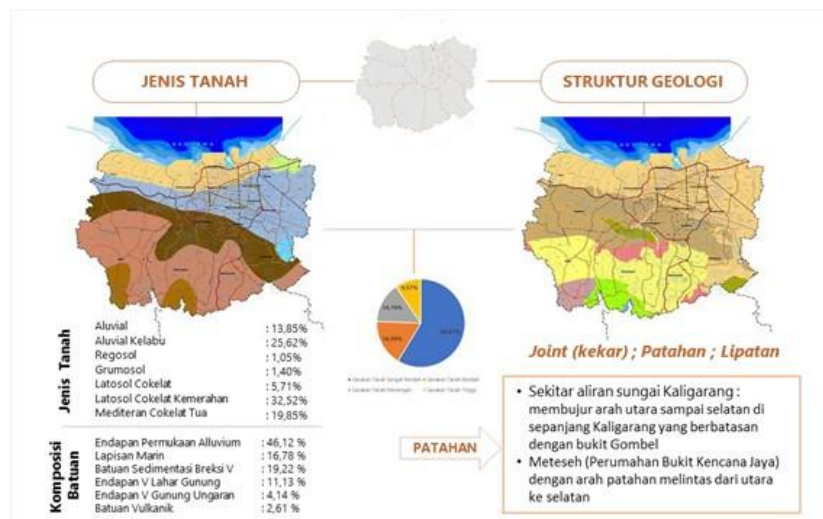


Gambar 16. Topografi Kota Semarang

Sumber: Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID), 2024

2.2.4 Geologi

Ditinjau dari komposisi batumannya, kondisi geologi Kota Semarang terdiri dari enam jenis batuan. Dari keseluruhan jenis tersebut, batuan endapan permukaan alluvium mendominasi dengan persentase mencapai 46,12% dari total luasan wilayah kota.



Gambar 17. Komposisi Batuan di Kota Semarang

Sumber: Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID), 2024

2.2.5 Hidrologi dan Hidrogeologi

Wilayah Kota Semarang dilalui oleh sejumlah sungai, di antaranya Kali Garang, Kali Pengkol, Kali Kreo, dan Kali Dungadem. Kali Garang merupakan sungai utama yang berhulu di Gunung Ungaran dan mengalir ke utara hingga bertemu dengan Kali Kreo dan Kali Kripik. Debit Kali Garang berkontribusi sebesar 53% dari total debit sungai-sungai di Semarang, diikuti Kali Kreo sebesar 34,7% dan Kali Kripik sebesar 12,3%.



Gambar 18. Hidrologi dan Hidrogeologi di Kota Semarang

Sumber: Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID), 2024

Sungai-sungai tersebut dikelola dalam 11 Daerah Aliran Sungai (DAS) dan menyumbang sekitar 69% bahan baku air minum masyarakat. Namun kualitas air sungai terus menurun akibat pencemaran. Di sisi lain, pembangunan yang masif dan tekanan urbanisasi mendorong aktivitas masyarakat semakin merambah ke kawasan hulu yang seharusnya berfungsi sebagai area konservasi. Dari sisi hidrogeologi, terdapat dua tipe akuifer di Semarang: akuifer bebas pada kedalaman 3–18 meter yang banyak dimanfaatkan warga dataran rendah melalui sumur gali, dan akuifer tertekan pada kedalaman 50–90 meter yang merupakan sumber air tawar potensial.

2.2.6 Klimatologi

Kondisi iklim Kota Semarang mengikuti pola umum iklim Indonesia dengan dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan berlangsung dari November hingga Mei, kala angin dari arah barat laut membawa banyak uap air. Lebih dari 80% curah hujan tahunan turun pada periode ini. Suhu rata-rata minimum berkisar antara 27,6°C hingga 29,2°C, sedangkan suhu maksimum antara 30°C hingga 34,8°C. Kelembaban udara relatif bulanan berkisar antara 66,93% hingga 85,64%. Kota Semarang juga mengalami dampak perubahan iklim yang nyata, ditandai dengan tren kenaikan suhu permukaan selama 100 tahun terakhir, pergeseran awal musim hujan, dan peningkatan frekuensi curah hujan ekstrem yang mengancam risiko banjir di bagian utara kota serta kekeringan di musim kemarau.



Gambar 19. Klimatologi di Kota Semarang

Sumber: Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID), 2024

2.3 Kondisi Demografis Kota Semarang

Berdasarkan proyeksi penduduk hasil Sensus Penduduk 2020, jumlah penduduk Kota Semarang pada tahun 2024 tercatat sebesar 1.708.833 jiwa, dengan laju pertumbuhan rata-rata 0,88% per tahun. Jumlah penduduk perempuan sebesar

863.656 jiwa sedikit lebih banyak dibandingkan laki-laki yang berjumlah 845.177 jiwa.

Persebaran penduduk antar kecamatan masih belum merata. Kecamatan Semarang Timur menjadi wilayah terpadat dengan kepadatan 12.260,54 jiwa per km², diikuti oleh Candisari, Gayamsari, dan Semarang Selatan. Sebaliknya, Kecamatan Tugu merupakan yang paling jarang penduduknya dengan kepadatan hanya 1.212,15 jiwa per km². Dari sisi pertumbuhan, Kecamatan Mijen dan Genuk mencatat laju pertumbuhan tertinggi masing-masing sebesar 3,81% dan 2,92%, sementara beberapa kecamatan lain seperti Semarang Selatan cenderung stagnan.

Kondisi demografis ini menghadirkan tantangan utama berupa ketimpangan persebaran penduduk yang perlu diperhatikan serius dalam perencanaan pembangunan kota, khususnya terkait penyediaan infrastruktur, layanan publik, perumahan, dan sistem transportasi yang merata dan berkelanjutan.

Tabel 16. Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Kota Semarang Tahun 2024

Kecamatan	Jumlah Kelamin			Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020–2024 (%)	Kepadatan Penduduk per km ²
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Total		
Mijen	46.420	46.668	93.088	3,81	1.646,90
Gungpati	50.735	50.842	101.577	0,95	1.743,16
Banyumanik	70.861	72..885	143.746	0,31	4.833,05
Gajah Mungkur	27.600	28.734	56.334	0,05	6.029,02
Semarang Selatan	30.224	31.794	62.018	-0,01	10.429,66
Candisari	37.317	38.125	75.442	0,00	11.793,19
Tembalang	100.313	101.508	201.821	1,67	5.113,34

Pedurungan	97.609	99.859	197.468	0,59	9.354,39
Genuk	68.709	68.647	137.356	2,92	5.287,18
Gayamsari	35.019	35.369	70.388	0,05	11.316,56
Semarang Timur	32.280	34.195	66.475	0,07	12.260,54
Semarang Utara	58.229	59.636	117.865	0,06	10.354,67
Semarang Tengah	26.454	28.754	55.208	0,07	10.671,14
Semarang Barat	73.355	75.972	149.327	0,08	6.888,85
Tugu	17.054	17.038	34.092	1,02	1.212,15
Ngaliyan	72.998	73.630	146.628	0,91	3.410,93
Kota Semarang	845.177	863.656	1.708.833	0,88	4.571,76

Sumber: Badan Pusat Statistika, 2024

2.4 Gambaran Umum BLU UPTD Trans Semarang

2.4.1 Sejarah BLU UPTD Trans Semarang

Trans Semarang, atau lebih dikenal sebagai BRT Trans Semarang, adalah sistem Bus Rapid Transit (BRT) yang beroperasi di Kota Semarang dan sebagian Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Layanan ini hadir sebagai solusi untuk mengurangi kemacetan kota sekaligus memfasilitasi mobilitas warga menuju pusat kota dan destinasi wisata. Salah satu kekhasan Trans Semarang dibandingkan bus perkotaan lainnya adalah penggunaan armada berdek tinggi yang membutuhkan halte khusus untuk naik-turun penumpang.

Gagasan pengoperasian Trans Semarang pertama kali dipaparkan oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang pada 22 Desember 2008. Uji coba Koridor I kemudian dilaksanakan pada 2 Mei 2009, bertepatan dengan Hari Jadi Kota Semarang ke-462, sebelum akhirnya beroperasi penuh mulai 18 September 2009

melalui pembentukan konsorsium PT Trans Semarang yang melibatkan Perum DAMRI, PO Minas, dan PO Ratakencana.

Terhitung sejak 1 Oktober 2010, pengelolaan Trans Semarang berada di bawah BLU UPTD Terminal Mangkang. Namun setelah Terminal Mangkang sebagai terminal tipe A beralih kewenangan ke Pemerintah Pusat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pengelolaan BRT Trans Semarang kemudian berdiri sendiri. Mulai 1 Oktober 2016, pengelolaan resmi dilakukan oleh Badan Layanan Umum BRT Kota Semarang berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2016. Sejak 3 Januari 2017 hingga saat ini, pengelolaan dilaksanakan oleh BLU UPTD Trans Semarang berdasarkan Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 550/18/2017.

2.4.2 Maksud dan Tujuan

Maksud Unit Pelayanan Teknis UPTD Trans Semarang menjadi Badan Layanan Umum adalah agar di dalam pelayanan transportasi dapat lebih leluasa dalam mengelola sumber daya, pelaksanaan tugas operasional publik dan pengelolaan keuangan.

Tujuan Unit Pelayanan Teknis UPTD Trans Semarang adalah:

- 1) Memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk naik dan turun penumpang di shelter atau rambu yang telah disediakan
- 2) Menyediakan layanan transportasi bagi masyarakat agar mereka dapat berpindah dengan mudah dan terhubung dengan berbagai koridor yang ada
- 3) Mendukung kelancaran berbagai aktivitas masyarakat di Kota Semarang

- 4) Menawarkan angkutan umum massal yang terjangkau, aman, nyaman, serta berbudaya, sehingga dapat dinikmati oleh seluruh warga Kota Semarang
- 5) Mewujudkan sistem transportasi yang lancar serta tertib.

2.4.3 Visi dan Misi BLU UPTD Trans Semarang

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 1 Tahun 2017 Visi BLU UPTD Trans Semarang adalah Menciptakan Pelayanan Bus Rapid Transit yang Profesional, Mandiri, Dapat Diandalkan, Berkesinambungan dan Terjangkau.

- 1) Profesional
Setiap kegiatan yang dilakukan oleh BLU UPTD Trans Semarang berorientasi pada pemenuhan standar yang ada
- 2) Mandiri
Mandiri dalam pengelolaan keuangan dan Sumber Daya Manusia di BLU UPTD Trans Semarang
- 3) Dapat Diandalkan
Kepastian pelayanan angkutan umum untuk menunjang mobilitas warga Kota Semarang
- 4) Berkesinambungan
Pelayanan pergantian antar moda guna meningkatkan aksesibilitas untuk mencapai lokasi tujuan
- 5) Terjangkau
Penetapan besaran retribusi dan tarif atau pungutan lain yang sah telah mempertimbangkan kemampuan daya beli pengguna jasa.

Adapun Misi BLU UPTD Trans Semarang sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan pelayanan Bus Rapid Transit yang professional dan terjangkau
- 2) Melaksanakan kemandirian pelayanan Bus Rapid Transit dengan prinsip otonomi dalam pengelolaan Keuangan dan Sumber Daya Manusia
- 3) Mendorong berkembangnya transportasi perkotaan yang dapat diandalkan dan berkesinambungan
- 4) Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi.

2.4.4 Area Layanan

Berdasarkan regulasi yang berlaku, tarif BRT Trans Semarang ditetapkan sebagai berikut: tiket umum tunai Rp4.000, tiket umum non-tunai (cashless) Rp3.000, serta tiket bersubsidi sebesar Rp1.000 untuk pelajar, mahasiswa, lansia, veteran, pemegang KIA, dan penyandang disabilitas. Waktu operasional layanan mencakup Koridor I–Feeder IV yang beroperasi pukul 05.30–18.30 WIB, serta Koridor Mangkang Malam yang beroperasi pukul 17.30–23.30 WIB.

Berdasarkan data dari BLU UPTD Trans Semarang, saat ini Trans Semarang melayani 8 koridor utama dan empat angkutan penumpang (feeder):

- 1) Karidor I sepanjang 29 km dari Terminal Mangkang - Terminal Penggaron
- 2) Karidor II 30 km, dari Terminal Terboyo - Terminal Sosemut/Unggaran Kabupaten Semarang
- 3) Karidor III 30 km, Pelabuhan Tanjung Emas-Jatingaleh
- 4) Karidor IV 30 km, Terminal Cangkiran - Jl. Imam Bonjol - Balaikota - Stasiun Tawang

- 5) Karidor V 32 km, Meteseh – Simpang Lima – Balaikota – Bandara A. Yani – Kawasan PRPP
- 6) Karidor VI 25 km, Kampus Universitas Semarang – Kampus Universitas Diponegoro
- 7) Karidor VII 34 km, Terminal Terboyo Jl. Raden Patah
- 8) Karidor VIII 59 km, dengan rute Terminal Cangkiran – Simpang Lima.

Sementara 4 angkutan pengumpan (feeder), yaitu:

- 1) Angkutan pengumpan (feeder) I sepanjang 30 km dari Ngaliyan – Suratmo
- 2) Angkutan pengumpan (feeder) II 30 km, Terminal – Terboyo – Kaligawa – Tlogosasi – Unimus – Rusunawa Kudu
- 3) Angkutan pengumpan (feeder) III 30 km, Terminal Penggaron Terminal Banyumanik
- 4) Angkutan pengumpan (feeder) IV 20 km, Terminal Gunung Pati – Kampus Universitas Negeri Semarang.

Selain itu, masih ada layanan swakelola antara Terminal Mangkang – Tugumuda – Simpang Lima. Jam layanan 17:30 – 23:00 WIB menggunakan 4 armada Siap Operasional (SO) dan 6 armada Siap Guna Operasional (SGO).

Jarak tempuh 30 km dan operasional 4 trip per hari.

Tabel 17. Armada BRT Trans Semarang

Karidor/ Feeder	Rute Utama	Jumlah Armada	Jenis Bus	Tahun Peresmian	Kepemilikan / Bantuan
Karidor I	Mangkang – Penggaron	22 (SO) + 3 (SGO)	Bus Besar	2009	Pemkot + Kemenhub

Karidor II	Terboyo – Sesemut	24 (SO) + 2 (SGO)	Medium	2012	Penyedia Jasa
Karidor III	Tanjungmas – Jatingaleh	16 (SO) + 2 (SGO)	Medium	2013	Penyedia Jasa
Karidor IV	Cangkiran – Tawang	24 (SO) + 2 (SGO)	Medium	2013	Penyedia Jasa
Karidor V	Meteseh – Bandar - PRPP	14 (SO) + 2 (SGO)	Medium	2017	Pemkot + Kemenhub
Karidor VI	UNDIP – UNNES	14 (SO) + 2 (SGO)	Medium	2017	Pemkot – Kemenhub + Provinsi
Karidor VII	Terboyo – Banyumanik – Balaikota	14 (SO) + 1 (SGO)	Medium	2018	Pemkot + Kemenhub
Karidor VIII	Cangkiran – Gunungpati – Simpang Lima	16 (SO) + 2 (SGO)	Medium	2019	Penyedia Jasa
Feeder 1	Ngaliyan – Kaligarang - Madukoro	22 (SO) + 2 (SGO)	Long ELF	2019	Penyedia Jasa
Feeder 2	Terboyo – Lemper - Fatmawati	22 (SO) + 2 (SGO)	Long ELF	2019	Penyedia Jasa
Feeder 3	Banyumanik - Penggaron	12 (SO) + 2 (SGO)	Long ELF	2019	Penyedia Jasa
Feeder 4	Gunungpati – BSB - UNNES	25 (SO) + 3 (SGO)	Long ELF	2020	Penyedia Jasa
Swakelola Malam 1	Bandara A. Yani – Simpang Lima	4 (SO) + 1 (SGO)	Medium	2018	Pemkot + Kemenhub
Swakelola Malam 2	Mangkang – Simpang Lima	4 (SO) + 1 (SGO)	medium	2022	Pemkot + Kemenhub

Sumber: BLU UPTD Trans Semarang

2.4.5 Struktur Organisasi

Tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan instansi ini adalah sebagai berikut:

1) Kepala BLU UPTD Trans Semarang

BLU UPTD Trans Semarang bertanggung jawab atas pelaksanaan sejumlah kegiatan teknis yang terkait dengan pengelolaan BLU UPTD Trans Semarang dalam lingkup Dinas Perhubungan. Untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab tersebut, pengelola BLU UPTD Trans Semarang memiliki beberapa fungsi, antara lain: penyusunan rencana program dan anggaran kerja BLU UPTD Trans Semarang, koordinasi dan perumusan Strategi Bisnis Anggaran, penyediaan dokumen anggaran, serta perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan terkait pengelolaan barang, aset tetap, dan investasi. Selain itu, pengelola juga bertugas menyelenggarakan sistem informasi manajemen dan informasi BLU UPTD Trans Semarang, menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), merumuskan kebijakan teknis dalam pengelolaan dan pemeliharaan BRT, merencanakan kebutuhan fasilitas BRT Trans Semarang, serta menjalankan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang.

2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Trans Semarang

Sub bagian tata usaha memiliki tanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, serta mengevaluasi kegiatan ketatausahaan. Dalam menjalankan tugas dan kewajiban tersebut, terdapat beberapa fungsi yang harus dilakukan, seperti menyiapkan kegiatan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, menyusun kebijakan di BLU

UPTD Trans Semarang, menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran, serta membagi tugas kepada bawahan. Selain itu, sub bagian tata usaha juga bertanggung jawab untuk menyediakan akomodasi dan jamuan dalam rapat atau pertemuan di lingkungan BLU UPTD Trans Semarang, menyusun laporan program dan kegiatan, serta melaksanakan fungsi lainnya yang diberikan oleh pemimpin sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Manajer Pengelola Keuangan

Tugas utama dari Manajer Pengelola Keuangan adalah melaksanakan berbagai kegiatan operasional yang terkait dengan pengelola keuangan di BLU UPTD Trans Semarang. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, pengelola keuangan perlu melakukan sejumlah kegiatan, di antaranya adalah menyusun rencana kerja dan program anggaran untuk BLU UPTD Trans Semarang. Selain itu, mereka juga bertanggung jawab untuk menyusun dan mengkoordinasikan rencana strategis anggaran bisnis, serta menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pelaksanaan anggaran. Pengelolaan uang piutang, pelaksanaan akuntansi, dan penyusunan laporan keuangan juga menjadi bagian dari tanggung jawab mereka. Proses lain yang juga menjadi bagian dari tugas ini adalah penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan menyiapkan bahan-bahan untuk laporan realisasi anggaran.

4) Devisi Sumber Daya Manusia (SDM)

Devisi Sumber Daya Manusia (SDM) bertanggung jawab untuk menjalankan berbagai kegiatan teknis yang mendukung pengelola keuangan dalam aspek sumber daya manusia. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, devisi ini memiliki beberapa fungsi utama, antara lain

pengelolaan sistem informasi manajemen serta informatika yang berkaitan dengan kepegawaian. Selain itu, divisi ini juga menangani urusan administrasi kepegawaian, menyusun bahan-bahan untuk peremusan kebijakan teknis di bidang sumber daya manusia, serta menyiapkan dokumen untuk rencana program dan anggaran di bidang tersebut.

5) Koordinator Administrasi Kepengawaian

Koordinator administrasi kepegawaian bertanggung jawab untuk melaksanakan berbagai kegiatan teknis dalam administrasi kepegawaian. Dalam menjalankan tugasnya, administrasi kepegawaian menyusun kebijakan teknis terkait pengadaan pegawai, merancang program serta anggaran untuk pengadaan pegawai, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas di bidang tersebut, serta melakukan inventarisasi masalah yang muncul dalam proses pengadaan pegawai. Selain itu, administrasi kepegawaian juga menyelenggarakan tugas-tugas administrative sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan mengimplementasikan sistem informasi manajemen kepegawaian.

6) Koordinator Pengembangan Pegawai

Tugas koordinator pengembangan kepegawaian adalah menjalankan sejumlah kegiatan teknis terkait pengembangan kepegawaian. Dalam rangka melaksanakan kewajiban tersebut, pengembangan kepegawaian menyusun kebijakan teknis di bidang mutasi, penempatan, dan pembinaan karir. Selain itu, mereka juga menyusun rencana program dan anggaran kerja untuk bidang mutasi, penempatan, dan pembinaan karir, serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas terkait di bidang tersebut. Kegiatan lainnya termasuk

pemantauan, pengawasan, serta pengendalian atas kegiatan di bidang mutasi, penempatan, dan pembinaan karir, diikuti dengan penyusunan laporan kerja untuk program pengembangan pengawai.

7) Devisi Keuangan

Tugas devisi keuangan adalah menjalankan sejumlah kegiatan teknis dalam pengelolaan keuangan. Dalam rangka memenuhi tugas dan kewajiban tersebut, devisi ini bertanggung jawab untuk menyusun rencana program serta anggaran kerja BLU UPTD Trans Semarang, merancang rencana strategis bisnis, serta menyiapkan dokumen anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan BLU UPTD Trans Semarang. Selain itu, devisi keuangan juga mengelola pendapatan dan belanja, menyelenggarakan akuntansi, serta menyusun laporan keuangan. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, evaluasi, pemantauan, serta pelaporan di bidang keuangan juga merupakan bagian dari tugas yang harus dilaksanakan oleh devisi ini.

8) Koordinator Anggaran Keuangan dan Akuntansi

Koordinator anggaran dan akuntansi bertanggung jawab untuk mengelola berbagai teknis dalam pengelolaan keuangan, khususnya dalam bidang akuntansi serta anggaran. Dalam menjalankan tanggung jawab tersebut, koordinator ini menyusun berbagai bahan yang diperlukan untuk merumuskan kebijakan teknis di sektor penyusunan anggaran, administrasi anggaran, serta perencanaan anggaran. Tugas lainnya mencakup penyusunan kerja anggaran dan program dalam bidang tersebut, serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan dengan penyusunan, administrasi anggaran, serta perencanaan.

9) Koordinator Perbendaharaan

Koordinator perbendaharaan bertugas untuk mengelola beberapa aspek teknis dalam pengelolaan keuangan perbendaharaan. Dalam melaksanakan kewajiban tersebut, koordinator ini menyusun bahan untuk merumuskan kebijakan teknis yang berkaitan dengan belanja non-gaji, belanja gaji, serta verifikasi dan evaluasi. Selain itu, ia juga bertanggung jawab dalam menyusun rencana kerja anggaran dan program yang mencakup belanja gaji, bidang belanja non-gaji, serta evaluasi maupun verifikasi. Koordinator ini turut mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas yang terkait dengan ketiga bidang tersebut, yaitu belanja gaji, belanja non-gaji, dan evaluasi serta verifikasi.

10) Divisi Umum

Divisi umum bertanggung jawab atas pelaksanaan beberapa kegiatan teknis terkait pengelolaan keuangan. Dalam menjalankan tugas dan kewajiban tersebut, divisi ini menyusun kebijakan bahan perumusan untuk bidang Tata Usaha (TU), merumuskan kebijakan pengelolaan aset tetap, investasi, serta barang. Selain itu, divisi umum juga mengelola penyusunan rencana kebutuhan bangunan serta fasilitas, serta menangani urusan kearsipan, surat menyurat, perjalanan dinas, ekspedisi, dokumentasi, pelaporan, serta kehumasan.

11) Koordinator Perencanaan, Tata Usaha dan Rumah Tangga

Koordinator Tata Usaha dan Rumah Tangga bertanggung jawab dalam menjalankan sejumlah kegiatan teknis pengelolaan di divisi umum. Dalam rangka memenuhi tugas dan kewajiban tersebut, ia menyusun kebijakan bahan perumusan untuk bidang Tata Usaha, merencanakan kebutuhan bangunan dan fasilitas, serta menyusun laporan kerja program Tata Usaha dan Rumah tangga.

12) Koordinator Perlengkapan dan Aset Koordinator

Tugas utama dari perlengkapan dari aset BLU UPTD Trans Semarang adalah melaksanakan berbagai kegiatan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan di divisi umum. Untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab tersebut, kordinator perlengkapan dan aset BLU UPTD Trans Semarang bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan di bidang perlengkapan dan aset daerah, menyusun rencana kebutuhan bangunan serta fasilitas, mengelola urusan terkait perlengkapan dan aset di BLU UPTD Trans Semarang.

13) Manajer Pengelola BRT Manajer

Manajer pengelola BRT Trans Semarang bertanggung jawab atas pelaksanaan sebagai tugas teknis operasional BRT, khususnya di bidang pengelolaan dan pemeliharaan. Untuk menjalankan kewajiban tersebut, pengelola BRT melakukan beberapa langkah, seperti merumuskan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengelola dan pemeliharaan BRT, menyusun rencana program serta anggaran kerja di sektor pengelola BRT Trans Semarang, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas yang terkait dengan pengelolaan dan pemeliharaan, serta menyusun laporan mengenai kinerja operasional, sarana dan prasarana, serta pengendalian BRT Trans Semarang.

14) Divisi Operasional

Divisi operasional bertanggung jawab atas pelaksanaan beberapa kegiatan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan BRT di bidang operasional BRT Trans Semarang. Untuk menjalankan tugas dan kewajiban tersebut, divisi ini merumuskan kebijakan teknis operasional BRT Trans Semarang, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas operasional, mengatur waktu untuk

proses menaikkan dan menurunkan penumpang (dwell time), memantau kecepatan perjalanan BRT, serta menyusun laporan kinerja operasional dari sistem BRT Trans Semarang.

15) Divisi Sarana dan Prasarana

Divisi sarana serta prasarana bertanggung jawab dalam menjalankan berbagai aktivitas teknis yang terkait dengan pengelolaan sarana dan prasarana BRT Trans Semarang oleh BLU UPTD Trans Semarang. Dalam rangka menjalankan tugas serta kewajibannya, divisi ini merumuskan kebijakan teknis untuk bidang sarana dan prasarana BRT Trans Semarang, menyusun program serta rencana kerja anggaran 21 untuk sektor tersebut, serta juga membuat laporan mengenai kinerja sarana serta prasarana BRT Trans Semarang.

16) Koordinator Pemeliharaan Shelter

Koordinator pemeliharaan sarana dan prasarana BRT Trans Semarang bertanggung jawab untuk menjalankan sejumlah kegiatan teknis dalam pengelolaan BRT Trans Semarang, khususnya di sektor sarana dan prasarana. Dalam rangka menjalankan tugas tersebut, perumusan kebijakan teknis mengenai pemeliharaan sarana dan prasarana BRT Trans Semarang dilakukan oleh pihak pemeliharaan. Selain itu, penyusunan rencana kerja anggaran dan program di bidang yang sama juga menjadi bagian dari tugas mereka. Koordinasi pelaksanaan tugas pemeliharaan sarana dan prasarana serta penyusunan laporan kinerja untuk sektor tersebut juga termasuk dalam tanggung jawab utama yang diemban.

17) Koordinator Perencanaan dan Pengadaan Sarana Prasarana

Tugas utama koordinator pengadaan sarana dan prasarana BRT Trans Semarang adalah melaksanakan berbagai kegiatan teknis yang berhubungan dengan pengelolaan BRT, khususnya bidang sarana dan prasarana. Dalam rangka menjalankan tanggung jawab tersebut, pihak pengadaan sarana dan prasarana BRT bertugas merumuskan kebijakan teknis yang terkait dengan pengadaan tersebut. Selain itu, mereka juga menyusun rencana program serta anggaran kerja di bidang pengadaan sarana dan prasarana BRT Trans Semarang. Tidak kalah penting, penyusunan laporan kinerja untuk pengadaan sarana dan prasarana BRT Trans Semarang juga menjadi bagian dari kewajiban mereka.

18) Divisi Pengendalian dan Pengawasan

Divisi pengendalian bertanggung jawab untuk menjalankan sejumlah kegiatan teknis terkait dengan pengelola BRT Trans Semarang dalam pengendalian operasional BRT Trans Semarang. Untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab tersebut, divisi pengendalian merumuskan kebijakan teknis dalam pengelola BRT Trans Semarang, menyusun rencana program serta anggaran kerja di bidang pengendalian, mempersiapkan bahan untuk pembinaan, pemantauan, serta pengawasan, dan juga menyusun laporan mengenai kinerja pengendalian BRT Trans Semarang.

19) Koordinasi Pengendalian Armada

Koordinator pengendalian armada bertugas untuk menjalankan berbagai kegiatan teknis dengan pengelolaan pengendalian armada BRT Trans Semarang. Dalam rangka memenuhi tugas dan tanggung jawab tersebut, pengendalian armada menyusun kebijakan teknis untuk pengelolaan armada,

merancang program serta anggaran kerja di bidang pengendalian armada, mengoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas pengendalian armada, dan menyusun laporan terkait kinerja pengendalian armada.

20) Koordinator Pengawasan Armada

Tugas utama koordinator pengawasan armada adalah mengelola sejumlah kegiatan teknis yang berkaitan dengan Pengelolaan BRT di sektor pengendalian. Dalam rangka menjalankan tugas tersebut, koordinator pengawasan armada bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan teknis terkait pengawasan armada. Selanjutnya, ia juga menyusun rencana program dan anggaran kerja untuk pengawasan armada, mengoordinasikan penjalanan tugas dalam pengawasan armada, serta menyusun laporan mengenai kinerja pengawasan armada.